



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 940-951

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Efektivitas Penatausahaan Keuangan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

Muhammad Ilham Surya Bismi<sup>1✉</sup>, Decky Dwi Utomo<sup>2</sup>

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: [34.0013@praja.ipdn.ac.id](mailto:34.0013@praja.ipdn.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penatausahaan keuangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penatausahaan keuangan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Organisasi dari W. Jack Duncan yang mencakup indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penatausahaan keuangan di kecamatan ini telah berjalan efektif, didukung oleh penggunaan SIPD yang terintegrasi pada setiap tahapan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan operator dan gangguan jaringan, namun sifatnya minim dan tidak menghambat proses secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penatausahaan Keuangan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*

## Abstract

Financial administration is an important part of realizing good governance, especially in terms of public financial management accountability. This study aims to analyze the effectiveness of financial administration in Johan Pahlawan District, West Aceh Regency through the use of the Local Government Information System (SIPD). The method used is qualitative with data collection techniques through observation, documentation, and literature study. The data were analyzed using W. Jack Duncan's Organizational Effectiveness Theory which includes indicators of goal achievement, integration, and adaptation. The results showed that the stages of financial administration in this sub-district have run effectively, supported by the use of SIPD which is integrated at each stage. Even so, there are still obstacles such as limited operators and network disruptions, but they are minimal and do not hamper the overall process.

Keywords: *Effectiveness, Financial Administration, Local Government Information System (SIPD)*

## PENDAHULUAN

Dalam era modernisasi birokrasi, prinsip *good governance* menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel. *Good governance* tidak hanya menekan pada efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. (Astuti et al., 2021)

Salah satu pilar konsep *good governance* adalah akuntabilitas keuangan, yang berarti bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada publik (Astuti et al., 2021). Pengelolaan keuangan publik menjadi aspek strategis yang tidak diabaikan. Pemerintah sebagai pengeola sumber daya publik dituntut untuk menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan efektif. Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dan cerminan dari integrasi birokrasi. (Syachbrani, 2024)

Dalam rangka mendukung prinsip akuntabilitas dan efektivitas, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD adalah sistem terpadu yang berfungsi untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Dasar hukum dari penggunaan SIPD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperkuat

dengan Peraturan Pemerintah dan berbagai regulasi teknis yang mengatur implementasi SIPD di seluruh pemerintahan daerah. (Bustanuddin et al., 2023)

Dalam konteks pengelolaan keuangan, SIPD berperan penting dalam penatausahaan keuangan, khususnya pada tahapan perencanaan anggaran, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan data, meningkatkan efisiensi administrasi serta memperkuat transparansi dan pengawasan terhadap belanja daerah. (Septiani & Isnawaty, 2024)

Telah banyak penelitian terdahulu telah meneliti terkait efektivitas penggunaan SIPD di berbagai instansi publik. Beberapa diantaranya adalah penelitian dari Putri & Tandean (2025) yang meneliti tentang efektivitas penerapan SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih. Dalam temuannya menunjukkan bahwa penerapan SIPD berpotensi dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, efisiensi dan akuntabilitas secara efektif. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya seperti SDM yang kurang pelatihan, tidak ada tindak lanjut dan keterbatasan penggunaan aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah penelitian dari Septiani & Isnawaty (2024) yang meneliti tentang efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam temuannya menunjukkan bahwa sistem SIPD telah mendukung pengelolaan data secara terorganisir dengan aksesibilitas yang baik dan mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, namun masih ada kendala dalam penerapannya sehingga kualitas informasi dan kualitas sistem tidak seluruhnya berjalan secara optimal karena SDM kurang menguasai SIPD dan infrastruktur jaringan cukup kurang.

Sebelum adanya sistem SIPD, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat masih menggunakan cara manual untuk menginput data-data sehingga tidak terpantau secara langsung. Oleh karena itu, penggunaan SIPD menjadi sangat penting karena kecamatan ini merupakan salah satu pelayanan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Dalam penatausahaan keuangannya melalui SIPD, Kecamatan Johan Pahlawan telah menerapkan lima tahapan utama yang diintegrasikan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahap melibatkan dokumen-dokumen penting dan laporan kinerja yang seluruhnya diproses secara digital melalui SIPD.

Dalam menganalisis efektivitas dan kendala dalam implementasi SIPD di Kecamatan Johan Pahlawan, penelitian ini juga akan menggunakan Teori Efektivitas Organisasi dari W. Jack Duncan sebagaimana yang dikutip dalam buku *Organizational Effectiveness: A*

*Behavioral View* oleh Richard M. Steers. Menurut Duncan, efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari keberhasilan mencapai tujuan semata, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap lingkungan eksternal dan menjaga keseimbangan internal. Indikator mengukur efektivitas organisasi terdiri atas pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi (Wurara et al., 2024)

Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada fokusnya pada tingkat kecamatan yang cukup jarang dikaji secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya. Sebagian besar penelitian lebih banyak dilakukan di tingkat kabupaten/kota atau dinas-dinas besar. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empirik baru terkait efektivitas penggunaan SIPD dalam skala mikro yaitu di unit kerja setingkat kecamatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana efektivitas penatausahaan keuangan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan dukungan penggunaan SIPD, serta apa saja kendala dan upaya solusi yang dihadapi dalam proses tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas penatausahaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks alamiah dan dengan cara menggambarkan secara mendalam proses interaksi sosial atau kebijakan yang sedang berlangsung. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap realitas empiris yang kompleks dan dinamis terkait implementasi SIPD dalam tata kelola keuangan daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses administrasi keuangan, wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen penting seperti RKA-SKPD, DPA-SKPD, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, studi kepustakaan juga dilakukan untuk menelaah literatur yang relevan dengan teori efektivitas organisasi, penerapan SIPD, serta tata kelola keuangan publik.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (2003), yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana penatausahaan keuangan di tingkat

kecamatan telah berjalan secara efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan bersifat valid, reliabel, dan relevan dengan fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk di tingkat kecamatan. Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, SIPD telah diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh tahapan penatausahaan keuangan sekretariat kecamatan. Implementasi SIPD ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*), khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. (Bustanuddin et al., 2023)

### Tahapan Penatausahaan Keuangan di Kecamatan Johan Pahlawan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat bahwa dalam penatausahaan keuangan melalui SIPD dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

#### 1. Tahap Perencanaan

Tahapan ini merupakan fondasi dari seluruh siklus penatausahaan keuangan. Kegiatan perencanaan diawali dengan penyusunan dokumen-dokumen strategis dan operasional seperti Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dokumen tersebut menjadi dasar penentuan program dan kegiatan kecamatan untuk tahun anggaran berjalan.

Selanjutnya, dilakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). RKA-SKPD memuat rincian kebutuhan anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam perjalanannya, apabila terdapat perubahan kebijakan atau kebutuhan mendesak, maka disusun pula dokumen Perubahan RKA-SKPD. Setelah proses perencanaan selesai, diterbitkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Perubahan DPA-SKPD, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan anggaran oleh kecamatan.

Proses ini ditutup dengan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sebagai alat evaluasi atas kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program. Seluruh penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan melalui sistem SIPD, yang tidak hanya menyederhanakan proses penginputan data, tetapi juga memungkinkan pengawasan secara real-time oleh instansi di atasnya seperti Bappeda dan Dinas Keuangan Kabupaten.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Setelah dokumen perencanaan dan anggaran ditetapkan, tahap pelaksanaan dimulai. Pada tahap ini, kecamatan menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam DPA. Salah satu tanggung jawab penting pada tahap ini adalah menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja, yang mencakup rincian realisasi penggunaan anggaran dari masing-masing kegiatan.

Proses penyusunan SPJ ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar evaluasi oleh inspektorat maupun auditor eksternal. Setiap pengeluaran wajib didukung oleh bukti fisik berupa kuitansi, daftar hadir, surat tugas, dokumentasi kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Bendahara pengeluaran memiliki peran sentral dalam memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen SPJ tersebut.

## 3. Tahap Pencairan

Pencairan anggaran dilakukan melalui pengajuan dokumen-dokumen pencairan yang disiapkan oleh bendahara pengeluaran. Dokumen tersebut meliputi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti pendukung.

Penyusunan dokumen pencairan harus dilakukan dengan cermat karena ketidaksesuaian data atau kekurangan dokumen dapat menyebabkan proses pencairan tertunda. Semua dokumen pencairan ini diinput melalui sistem SIPD yang telah terintegrasi dengan server pemerintah daerah. Sistem ini memudahkan koordinasi antarunit dan mempercepat proses verifikasi di tingkat kabupaten.

## 4. Tahap Pelaporan

Pelaporan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Kecamatan Johan Pahlawan secara rutin menyiapkan laporan bulanan dan tahunan mengenai realisasi belanja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Laporan ini tidak hanya mencakup sisi keuangan, tetapi juga mencakup capaian fisik dan kinerja dari setiap program. Proses pelaporan dilakukan melalui SIPD, sehingga semua pihak yang berkepentingan, termasuk inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dapat melakukan pemantauan secara daring.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap terakhir dalam siklus penatausahaan keuangan adalah pertanggungjawaban. Pada tahap ini, disusun laporan keuangan akhir tahun anggaran yang menjadi cerminan dari keseluruhan pelaksanaan anggaran kecamatan selama satu tahun. Laporan ini memuat data akumulasi dari seluruh kegiatan dan belanja, serta menjadi dasar evaluasi dan audit tahunan. Penyusunan laporan ini dilakukan oleh bendahara dan tim anggaran kecamatan, kemudian disampaikan kepada pemerintah kabupaten sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir tahun. SIPD kembali berperan penting dalam menyusun dan mengarsipkan laporan ini agar dapat ditelusuri secara sistematis.

#### Efektivitas Penatausahaan Keuangan di Kecamatan Johan Pahlawan

Efektivitas penatausahaan keuangan di Kecamatan Johan Pahlawan dapat dianalisis menggunakan tiga indikator utama dari teori efektivitas organisasi menurut Duncan dalam Steers (2003), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana organisasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menghadapi kompleksitas tugas-tugas publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan melalui SIPD.

##### 1. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Indikator pencapaian tujuan berkaitan langsung dengan seberapa jauh organisasi dapat memenuhi target atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kecamatan Johan Pahlawan, penatausahaan keuangan berjalan mengikuti alur dan tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Seluruh tahapan ini telah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Perencanaan disusun melalui dokumen RENSTRA, RENJA, RKA-SKPD, DPA-SKPD hingga pelaporan capaian kinerja. Semua dokumen ini diinput melalui SIPD dan menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dengan standar pelaporan nasional.

Dokumen pencairan, seperti SPP dan SPM, disusun oleh bendahara sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan penganggaran yang sudah ditetapkan. Pelaporan dan pertanggungjawaban juga dilakukan secara terstruktur berdasarkan realisasi anggaran bulanan maupun tahunan. Hal ini mencerminkan bahwa tujuan utama penatausahaan keuangan, yaitu pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan terkontrol telah tercapai dengan baik.

## 2. Integrasi (*Integration*)

Indikator integrasi menilai seberapa baik komponen internal organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di Kecamatan Johan Pahlawan, penatausahaan keuangan melibatkan kerja tim yang saling terhubung antar bagian, seperti operator SIPD, bendahara, sekretaris kecamatan, dan aparatur lainnya.

Proses kerja yang dijalankan menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas dan keselarasan antara sistem administrasi manual dan sistem berbasis aplikasi. Pemanfaatan SIPD sebagai sistem informasi utama telah menyatukan berbagai jenis dokumen dan prosedur kerja ke dalam satu alur yang terkonsolidasi.

Setiap pegawai memahami peran masing-masing dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan alur birokrasi yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan sistem kerja yang terkoordinasi, mengurangi kemungkinan tumpang tindih kewenangan, dan meningkatkan efisiensi kerja antar bagian.

## 3. Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebijakan. Dalam hal ini, Kecamatan Johan Pahlawan menunjukkan kapasitas adaptif yang cukup baik, terutama dalam merespons kebijakan digitalisasi pengelolaan keuangan melalui SIPD.

Meskipun SIPD merupakan sistem baru yang kompleks, aparatur kecamatan mampu menyesuaikan proses kerja dengan alur dan fitur yang tersedia dalam sistem tersebut. Berbagai laporan dan dokumen yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah beralih ke sistem berbasis aplikasi.

Kemampuan menyesuaikan diri ini terlihat dari rutinitas kerja yang mulai terbentuk, meskipun belum seluruh personel memiliki latar belakang teknis di bidang IT atau aplikasi. Proses adaptasi juga ditunjukkan dengan kemampuan pegawai untuk mengembangkan solusi internal serta belajar dari siklus kerja sebelumnya untuk menyusun strategi kerja yang lebih efisien ke depan.

Berdasarkan hasil observasi, secara keseluruhan, SIPD memiliki kontribusi besar dalam menunjang efektivitas penatausahaan keuangan di Kecamatan Johan Pahlawan. Sistem ini tidak hanya menyediakan platform input dan pengelolaan data, tetapi juga memfasilitasi kontrol, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara digital. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan terintegrasi, SIPD membantu mempercepat proses administrasi, memperkecil kesalahan dalam penyusunan dokumen, serta mempermudah proses audit dan evaluasi. Dalam konteks implementasinya di Kecamatan Johan Pahlawan, SIPD telah menjadi alat teknologi yang efektif dalam memastikan bahwa setiap tahapan penatausahaan dapat dilakukan secara terstandar dan terdokumentasi dengan baik.

### Kendala dan Solusi Penatausahaan Keuangan di Kecamatan Johan Pahlawan

Meskipun penatausahaan keuangan di Kecamatan Johan Pahlawan telah berjalan dengan efektif dan sebagian besar tahapan telah dilakukan sesuai prosedur melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan sejumlah kendala yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

#### 1. Kendala dalam Penatausahaan Keuangan

Berdasarkan hasil observasi, kendala yang dihadapi sebagai berikut:

##### a. Kurangnya Jumlah Operator SIPD

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia, khususnya operator yang bertugas menjalankan input data dan pengelolaan dokumen melalui SIPD. Dengan kompleksitas sistem dan banyaknya dokumen yang harus diproses, jumlah operator yang terbatas menyebabkan beban kerja yang tinggi, memperlambat proses input data, serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administratif.

##### b. Masalah Teknis Jaringan dan Sistem SIPD

Masalah lain yang sering muncul adalah kendala teknis, terutama yang berkaitan dengan jaringan internet dan performa sistem SIPD itu sendiri. Dalam beberapa kasus, akses ke dalam sistem terganggu karena koneksi yang lambat atau server yang tidak responsif. Gangguan seperti ini dapat menyebabkan penundaan dalam penginputan dokumen, pencetakan laporan, serta koordinasi data antar bagian. Meskipun tidak bersifat kronis, gangguan teknis ini tetap menjadi hambatan yang berulang.

## 2. Upaya sebagai Solusi yang Dilakukan

### a. Rencana Pelatihan Khusus bagi Operator SIPD

Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan SDM, pihak kecamatan telah mempertimbangkan untuk menyelenggarakan pelatihan teknis khusus bagi operator SIPD. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi penggunaan sistem, mempercepat adaptasi terhadap fitur-fitur terbaru dalam aplikasi, serta memperluas pemahaman teknis agar operator dapat mengelola data secara lebih efisien dan mandiri.

### b. Koordinasi dan Penguatan Infrastruktur Teknologi

Untuk mengatasi masalah jaringan dan sistem, diperlukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten atau instansi teknis terkait guna meningkatkan kualitas jaringan internet, memperkuat server lokal (jika diperlukan), serta melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil kemungkinan gangguan teknis yang berdampak pada penundaan proses administrasi keuangan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penatausahaan keuangan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan telah berjalan secara sistematis melalui lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang seluruhnya telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat bantu utama. Analisis menggunakan teori efektivitas organisasi menunjukkan bahwa sistem ini telah memenuhi indikator pencapaian tujuan, integrasi-antarpihak, dan kemampuan adaptasi, sehingga secara umum penerapan SIPD pada penatausahaan keuangan di Kecamatan Johan Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan efektif.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah operator dan gangguan teknis sistem yang bersifat minimal. Oleh karena itu, disarankan agar pihak kecamatan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperkuat infrastruktur jaringan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data observasi yang terbatas pada dokumentasi internal kecamatan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali terkait dimensi partisipatif dan sosialisasi secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>
- Bustanuddin, Yamin, A., & Zulkieflimansyah. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8405–8410. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3125>
- Cledwin, D., Darmanto, D., & Daryono, D. (2024). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gerdema dan RT Bersih di Desa Taras, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 10(1), 195. <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i1.1680>
- Lumbantobing, S. L., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1546–1558. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7227>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Putri, F. D., & Tandean, V. A. (2025). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih. *Journal Accounting International Mount Hope*, 3(1), 9–18.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208.
- Steers, R. M. (2003). *Efektivitas organisasi: Suatu tinjauan*. Erlangga. (Dikutip dalam Duncan, *Teori Efektivitas Organisasi*)
- Susila, E. S., Sugiyanto, E., & Digdowiseiso, K. (2021). Pengaruh Efektivitas Pengelolaan PNBP terhadap Kinerja Keuangan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2018-2020. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 185–210.

<https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i2.1040>

Syachbrani, W. (2024). Analisis Efektivitas Manajemen Keuangan dan Akuntabilitas dalam Mendukung Kinerja Bawaslu Kota Makassar. *Economics and Digital Business Review*, 6(1), 01–08. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i1.1907>

Wurara, C. N. C., Stefanus Sampe, Donald K. Monintja, Michael Mamentu, Fanley N. Pangemanan, & Steeva G. Rondonuwu. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Tomohon. *Journal Publicuho*, 7(2), 802–810. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436>.